

**PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT DAN ADVOKASI WALHI DIY  
TERHADAP KEPUASAN PEMBUATAN RTH KRICAK**

Lara Ayu Lestari<sup>1</sup>, Dyah Rahayuning Perwitasari<sup>2</sup>, Bulan Erika Bato<sup>3</sup>, Iqbal Saputra Zana<sup>4</sup>, Gusti Naufal Rizky Perdana<sup>5</sup>

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

Email Korespondensi: laraayulestari@fisip.unmul.ac.id

**ABSTRACT**

This Study Aims To Analyze The Influence Of Community Participation and advocacy by WALHI DIY on community satisfaction in the process of creating Green Open Spaces (RTH) in Kricak Village, Yogyakarta City. The research method used is a quantitative approach with an Ex-Post Facto design, which aims to examine the relationship between community participation, WALHI DIY advocacy, and community satisfaction. Data were collected through questionnaires distributed to 160 residents in Kricak Village and analyzed using multiple linear regression. The results show that both community participation in the RTH development process and the advocacy carried out by WALHI DIY have a significant impact on the level of community satisfaction. Community participation in the planning and implementation of RTH development increases a sense of ownership of the project, while advocacy by WALHI DIY enhances community understanding of the importance of RTH and how the process can improve their quality of life. This finding provides an important contribution to the development of more participatory RTH development policies, where the community is actively involved, and policies that support environmental sustainability. This research is expected to serve as a reference in the implementation of more inclusive green space development policies that have a positive impact on the community.

**Keywords:** Advocacy, Community Satisfaction, Community Participation.

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh partisipasi masyarakat dan advokasi oleh WALHI DIY terhadap kepuasan masyarakat dalam proses pembuatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kelurahan Kricak, Kota Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan desain *Ex-Post Facto*, yang bertujuan untuk meneliti hubungan antara variabel partisipasi masyarakat, advokasi WALHI DIY, dan kepuasan masyarakat. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang dibagikan kepada 160 warga di Kelurahan Kricak, dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan RTH, maupun advokasi yang dilakukan oleh WALHI DIY, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepuasan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan RTH meningkatkan rasa kepemilikan terhadap proyek tersebut, sementara advokasi oleh WALHI DIY meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya RTH dan bagaimana proses tersebut dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Temuan ini memberikan kontribusi penting untuk pengembangan kebijakan pembangunan RTH yang lebih partisipatif, di mana masyarakat dilibatkan secara aktif, serta kebijakan yang mendukung keberlanjutan lingkungan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam implementasi kebijakan pembangunan ruang terbuka hijau yang lebih inklusif dan berdampak positif bagi masyarakat.

**Kata kunci:** Advokasi, Kepuasan Masyarakat, Partisipasi Masyarakat.

## PENDAHULUAN

Kota merupakan pusat berbagai kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya yang terus berkembang pesat, termasuk di Yogyakarta. Proses urbanisasi ini menyebabkan peningkatan kepadatan penduduk yang berimbas pada kebutuhan ruang yang semakin tinggi, baik untuk tempat tinggal, fasilitas umum, maupun infrastruktur. Namun, tingginya konversi lahan terbangun tersebut berimplikasi pada penurunan kualitas lingkungan perkotaan. Beberapa indikator penurunan kualitas lingkungan yang terlihat antara lain berkurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH), meningkatnya polusi udara akibat emisi kendaraan bermotor, penurunan daya serap tanah yang memicu banjir dan genangan, hingga meningkatnya suhu udara perkotaan (urban heat island). Kondisi ini sesuai dengan temuan Sitorus & Wulandari (2022) yang menegaskan bahwa keterbatasan RTH di kota-kota besar berkontribusi signifikan terhadap degradasi lingkungan dan penurunan kenyamanan hidup masyarakat (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, 2008).

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 mengharuskan setiap kota menyediakan minimal 30% Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan pembagian 20% untuk RTH publik dan 10% untuk RTH privat. Namun, banyak kota di Indonesia, termasuk Yogyakarta, yang belum memenuhi target tersebut. Pada tahun 2015, RTH publik di Yogyakarta hanya mencapai 5,39%, jauh dari target yang seharusnya mencapai 20%. Hal ini menunjukkan perlunya upaya besar untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas RTH di Yogyakarta, terutama di kawasan seperti Kelurahan Kricak. Seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum yang memuat pedoman penyediaan dan pemanfaatan RTH di perkotaan, penting untuk mencapai target ini untuk menjaga keseimbangan ekosistem perkotaan dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, 2008).

Pembangunan RTH di Kelurahan Kricak, Kota Yogyakarta, dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan advokasi oleh WALHI DIY. WALHI DIY bekerja sama dengan Forum Komunikasi Winongo Asri (FKWA) untuk mendampingi masyarakat dalam proses pembuatan RTH. Advokasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya RTH serta memastikan bahwa pembangunan tersebut sesuai dengan aspirasi masyarakat. Hal ini juga bertujuan agar RTH yang dibangun dapat berfungsi secara optimal dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Sebagai lembaga swadaya masyarakat, WALHI DIY berperan penting dalam mengedukasi masyarakat dan memastikan agar pembangunan ruang terbuka hijau dilakukan secara inklusif, ramah lingkungan, dan sesuai dengan kebutuhan sosial masyarakat (Fitriani & Rahman, 2020).

Proses pembuatan RTH di Kelurahan Kricak dimulai dengan pertemuan antara WALHI DIY, FKWA, dan masyarakat setempat. Dalam pertemuan tersebut, dibahas konsep "rumah sungai", yang tidak hanya menjadikan RTH sebagai tempat bermain tetapi juga sebagai tempat edukasi bagi masyarakat. Selain itu, diskusi dengan warga fokus pada bagaimana mengelola ruang terbuka yang ada, termasuk pemanfaatan sumber daya alam yang sudah ada, seperti persawahan dan sungai di lokasi tersebut. RTH ini diharapkan dapat berperan sebagai sarana edukasi, misalnya dengan adanya pojok literasi dan kincir air yang dapat dijadikan objek pembelajaran. Konsep semacam ini mengintegrasikan elemen alam dengan proses edukasi masyarakat, yang sejalan dengan tren global dalam merancang ruang terbuka hijau yang tidak hanya berfungsi secara ekologis, tetapi juga sebagai ruang belajar bagi komunitas (Azizah, 2019).

Namun, terdapat tantangan dalam pelaksanaan pembangunan RTH ini, seperti kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat dan ketidakpahaman tentang proses pembuatan RTH. Beberapa warga juga merasa tidak puas karena lokasi pembuatan RTH semula adalah Tempat Pembuangan Akhir (TPA), yang menjadi mata pencaharian bagi sebagian warga. Selain itu, walaupun advokasi telah dilakukan, masih ada sebagian warga yang belum memberikan perhatian penuh terhadap program ini. Masalah teknis lainnya, seperti pengelolaan air dan pemilihan tanaman yang sesuai, juga menjadi hambatan dalam proses pembuatan RTH. Tantangan ini sejalan dengan temuan dalam penelitian yang menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dan kurangnya pemahaman terhadap proses pembangunan dapat menghambat keberhasilan proyek ruang terbuka hijau. Selain itu, pemilihan lokasi yang tidak

ideal, seperti bekas TPA, seringkali menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat yang sebelumnya bergantung pada lahan tersebut untuk mata pencaharian (Fitriani & Rahman, 2020).

Berdasarkan temuan ini, beberapa saran dapat diberikan untuk meningkatkan kualitas pembangunan RTH di masa depan. Pertama, perlu adanya peningkatan partisipasi masyarakat dengan lebih sering mengadakan pertemuan dan pelatihan yang melibatkan masyarakat secara langsung. Kedua, pemberdayaan lembaga advokasi seperti WALHI DIY harus terus didorong untuk memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik. Ketiga, diperlukan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait agar proses pembangunan RTH dapat berjalan lancar dan lebih efisien. Terakhir, penting untuk melakukan evaluasi dan pemeliharaan secara berkala untuk memastikan RTH dapat berfungsi dengan baik dalam jangka panjang dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain Ex-Post Facto untuk menganalisis pengaruh partisipasi masyarakat dan advokasi WALHI DIY terhadap kepuasan masyarakat dalam pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kelurahan Kricak, Kota Yogyakarta. Desain ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan sebab-akibat antar variabel yang telah terjadi tanpa melakukan intervensi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh warga RT 01 RW 01 Kelurahan Kricak, yang berjumlah 375 jiwa, dengan sampel sebanyak 160 orang yang dipilih menggunakan purposive sampling, berdasarkan kriteria pendidikan minimal SLTA/Sederajat. Instrumen penelitian utama adalah kuesioner dengan skala *Likert* yang mengukur tiga variabel utama: partisipasi masyarakat, advokasi WALHI DIY, dan kepuasan masyarakat. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang bersedia mengisi dan wawancara dengan perwakilan masyarakat untuk memperoleh data kualitatif terkait proses partisipasi dan advokasi. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda untuk menguji pengaruh antara variabel independen (partisipasi masyarakat dan advokasi WALHI DIY) terhadap variabel dependen (kepuasan masyarakat), serta analisis deskriptif untuk menggambarkan distribusi data. Hipotesis penelitian yang diuji adalah: 1) Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap kepuasan masyarakat, 2) Advokasi WALHI DIY berpengaruh positif terhadap kepuasan masyarakat, dan 3) Partisipasi masyarakat dan advokasi WALHI DIY secara simultan berpengaruh positif terhadap kepuasan masyarakat.

## PEMBAHASAN

### Kepuasan Masyarakat

Kepuasan masyarakat merupakan perasaan yang timbul setelah membandingkan harapan dan kenyataan yang diterima oleh individu atau kelompok dalam suatu kegiatan atau layanan. Menurut Tjiptono (2005), kepuasan masyarakat terjadi ketika kinerja yang dirasakan oleh masyarakat sesuai dengan atau melebihi harapan mereka. Sebaliknya, jika kinerja yang diterima lebih rendah daripada harapan, maka ketidakpuasan akan timbul. Kepuasan masyarakat dalam konteks pembangunan RTH berhubungan erat dengan kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, perencanaan yang melibatkan masyarakat, dan keberlanjutan program yang dilakukan. Westbrook dan Reilly (1983) mendefinisikan kepuasan masyarakat sebagai respons emosional yang berkaitan dengan kualitas produk atau layanan yang diterima. Dalam konteks RTH, kepuasan masyarakat akan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana RTH tersebut dapat memenuhi harapan masyarakat, baik dari segi kualitas ruang, kenyamanan, aksesibilitas, maupun manfaat yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat (Ghozali & Edinita, 2021).

### Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan aktif individu atau kelompok dalam proses pengambilan

*Penerbit:*

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

[redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id](mailto:redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id)

205

Indexed



SINTA 5

PKP|INDEX



keputusan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan atau program yang berhubungan dengan kepentingan umum. Pidarta (2011) menyatakan bahwa partisipasi adalah keterlibatan mental, fisik, dan emosional seseorang dalam sebuah kegiatan untuk mencapai tujuan bersama. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan RTH sangat penting karena dapat meningkatkan rasa memiliki terhadap proyek tersebut, serta memperbesar kemungkinan keberlanjutan dan kesesuaian RTH dengan kebutuhan masyarakat. Conyer (1984) membagi partisipasi masyarakat menjadi beberapa jenis, mulai dari partisipasi dalam pengambilan keputusan hingga partisipasi dalam menikmati hasil dari pembangunan tersebut. Dalam konteks pembangunan RTH, partisipasi masyarakat sangat penting dalam memastikan bahwa ruang yang dibangun benar-benar memenuhi kebutuhan sosial, lingkungan, dan rekreasi bagi warga kota (Sitorus & Wulandari, 2022).

## Advokasi

Advokasi adalah serangkaian tindakan atau usaha yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi untuk mempengaruhi kebijakan publik demi tercapainya perubahan sosial yang diinginkan. Suharto (2006) menjelaskan bahwa advokasi bertujuan untuk memberikan dukungan atau pembelaan terhadap kelompok atau individu yang membutuhkan perhatian, serta memperjuangkan kepentingan kelompok tersebut di hadapan pengambil keputusan. Dalam pembangunan RTH, advokasi oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat seperti WALHI DIY berperan penting dalam memastikan bahwa kebijakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah tidak hanya memperhatikan aspek teknis, tetapi juga melibatkan suara masyarakat dan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan. Miller dan Jane (2005) menekankan bahwa advokasi berfokus pada upaya untuk mempengaruhi bagaimana kekuasaan digunakan dalam pembuatan kebijakan publik, dengan memperjuangkan hak-hak masyarakat yang mungkin tidak terdengar tanpa adanya peran advokasi. Advokasi dalam konteks RTH dapat meliputi penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya RTH, serta mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dalam perencanaan ruang terbuka hijau di wilayah mereka (Fitriani & Rahman, 2020).

## Hubungan Antara Partisipasi Masyarakat, Advokasi, dan Kepuasan Masyarakat

Terdapat hubungan yang erat antara partisipasi masyarakat, advokasi, dan kepuasan masyarakat dalam pembangunan RTH. Yusran Paris (2014) menunjukkan bahwa dimensi tanggung jawab dan daya tanggap pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kepuasan masyarakat dalam layanan publik. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan RTH meningkatkan keterlibatan mereka dalam proses tersebut, sehingga mereka merasa lebih puas dengan hasilnya karena merasa menjadi bagian dari keputusan yang diambil. Selain itu, advokasi yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat seperti WALHI DIY juga meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya RTH dan mendukung mereka untuk menyuarakan aspirasi serta kebutuhannya.

Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat berfungsi sebagai faktor yang meningkatkan kepuasan masyarakat, sementara advokasi memastikan bahwa suara masyarakat didengar dan kebutuhan mereka diakomodasi dalam kebijakan pembangunan RTH. Tjiptono (2008) menyatakan bahwa keberhasilan suatu proyek sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat merasa terlibat dan puas dengan hasil yang diperoleh.

## Pentingnya RTH dalam Pembangunan Perkotaan

Ruang Terbuka Hijau (RTH) memainkan peran yang sangat penting dalam menciptakan kualitas hidup yang lebih baik di perkotaan. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 5/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH menyatakan bahwa RTH harus memenuhi fungsi ekologis, sosial, dan estetika. RTH yang baik harus mampu menjaga keseimbangan ekosistem, menyediakan ruang untuk rekreasi, dan memperindah lingkungan perkotaan. Keberadaan RTH yang cukup tidak hanya

berdampak pada kualitas udara dan iklim mikro, tetapi juga memberikan manfaat sosial berupa ruang untuk interaksi antarwarga dan mempererat hubungan sosial di dalam komunitas.

Namun, untuk mencapai tujuan ini, keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap pembangunan RTH menjadi hal yang sangat penting. Suharto (2006) menyatakan bahwa advokasi yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat, seperti WALHI DIY, membantu memperjuangkan pembangunan yang ramah lingkungan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tanpa advokasi yang kuat dan partisipasi yang aktif dari masyarakat, banyak pembangunan RTH yang gagal memenuhi harapan masyarakat.

## **Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Kepuasan Masyarakat**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepuasan masyarakat terhadap pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Masyarakat yang terlibat secara aktif dalam proses pembuatan RTH, baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemeliharaan, merasa lebih puas dengan hasil yang diperoleh. Partisipasi ini tidak hanya terbatas pada kehadiran fisik dalam kegiatan, tetapi juga mencakup kontribusi ide, tenaga, serta pemikiran yang diberikan oleh masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan RTH memungkinkan mereka untuk mengemukakan aspirasi, harapan, dan kebutuhan terkait ruang terbuka tersebut. Hal ini membuat proyek pembangunan menjadi lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Masyarakat merasa memiliki andil dalam proses tersebut, yang pada gilirannya meningkatkan rasa kepemilikan terhadap RTH yang dibangun. Seperti yang dijelaskan oleh Pidarta (2011), partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pembangunan berperan penting dalam mencapai tujuan bersama, di mana hasil yang dicapai akan lebih memenuhi harapan mereka.

Partisipasi masyarakat juga berperan dalam meminimalkan potensi ketidakpuasan yang sering timbul akibat ketidaksesuaian antara pembangunan yang dilakukan dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai agen yang aktif dalam pembangunan, yang semakin memperkuat rasa kepuasan terhadap hasil akhir.

## **Pengaruh Advokasi WALHI DIY terhadap Kepuasan Masyarakat**

Selain partisipasi masyarakat, advokasi oleh WALHI DIY juga menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan masyarakat. WALHI DIY berperan sebagai mediator antara masyarakat dan pemerintah, memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat diperhatikan dalam setiap tahap pembangunan RTH. Advokasi ini mencakup penyuluhan, pendidikan kepada masyarakat, serta upaya untuk mempengaruhi kebijakan publik agar lebih sensitif terhadap kebutuhan lingkungan dan sosial masyarakat.

Advokasi yang dilakukan oleh WALHI DIY meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya RTH dan peran mereka dalam menjaga keberlanjutannya. WALHI DIY juga mendorong masyarakat untuk aktif terlibat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan RTH. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat tentang manfaat dan pentingnya RTH, masyarakat merasa lebih puas dan memiliki rasa tanggung jawab yang lebih besar terhadap pemeliharaan dan penggunaan ruang terbuka tersebut.

Namun, meskipun advokasi oleh WALHI DIY memberikan dampak positif terhadap kepuasan masyarakat, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi, seperti kurangnya perhatian dari pemerintah setempat dalam hal pengelolaan teknis RTH, seperti masalah pengelolaan air dan pemilihan tanaman yang sesuai dengan kondisi lokal. Masalah ini kadang menurunkan tingkat kepuasan masyarakat meskipun advokasi telah dilakukan dengan baik.

## **Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Advokasi WALHI DIY secara Simultan terhadap Kepuasan Masyarakat**

Ketika partisipasi masyarakat dan advokasi WALHI DIY digabungkan, keduanya memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap kepuasan masyarakat dibandingkan dengan masing-masing variabel secara terpisah. Partisipasi yang aktif, didukung oleh advokasi yang kuat, menciptakan proses pembangunan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Masyarakat merasa dihargai dan didengarkan, yang meningkatkan kepuasan mereka terhadap hasil pembangunan RTH.

Masyarakat yang terlibat aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan RTH merasa bahwa keputusan yang diambil lebih mencerminkan kebutuhan mereka. Di sisi lain, advokasi WALHI DIY memperkuat posisi masyarakat dengan memberikan informasi dan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya RTH, serta memperjuangkan kepentingan masyarakat dalam proses perencanaan dan kebijakan publik. Dengan demikian, kombinasi partisipasi masyarakat dan advokasi menjadi faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pembangunan RTH.

Meskipun begitu, beberapa tantangan masih ada, seperti keterbatasan sumber daya dari pemerintah untuk mendukung penuh partisipasi masyarakat dan advokasi yang dilakukan. Pemerintah perlu memberikan perhatian lebih dalam memfasilitasi dan mendukung keberlanjutan program-program tersebut untuk mencapai hasil yang optimal dan lebih merata di seluruh wilayah.

## **Tantangan dalam Proses Pembangunan RTH**

Meskipun ada pengaruh positif dari partisipasi masyarakat dan advokasi WALHI DIY terhadap kepuasan masyarakat, ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan lahan untuk pembangunan RTH, terutama di daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi, seperti yang terjadi di Kota Yogyakarta. Selain itu, kurangnya koordinasi antara berbagai pihak terkait, baik pemerintah, masyarakat, maupun LSM, juga menjadi hambatan dalam memastikan pembangunan RTH berjalan lancar.

Selain itu, ketidakpuasan sebagian warga terkait lokasi pembangunan RTH, yang sebelumnya merupakan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), menunjukkan bahwa pemilihan lokasi harus mempertimbangkan aspek sosial dan budaya masyarakat. Beberapa warga yang sebelumnya bekerja sebagai pemulung di area tersebut merasa kehilangan mata pencaharian mereka. Oleh karena itu, proses perencanaan harus lebih inklusif dan memperhatikan dampak sosial yang ditimbulkan dari perubahan penggunaan lahan.

## **Implikasi Kebijakan dan Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan, penelitian ini menyarankan agar pemerintah terus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahap pembangunan RTH dan memberikan dukungan lebih kepada organisasi-organisasi advokasi seperti WALHI DIY dalam mengedukasi masyarakat dan mendampingi mereka dalam proses pembangunan. Keberhasilan pembangunan RTH tidak hanya bergantung pada aspek teknis, tetapi juga pada kemampuan untuk mengakomodasi kebutuhan sosial dan budaya masyarakat setempat.

Pemerintah juga disarankan untuk lebih memperhatikan aspek pengelolaan teknis RTH, seperti pemilihan tanaman yang sesuai dengan kondisi lingkungan, pengelolaan air yang efektif, serta penyediaan fasilitas umum yang memadai. Pendekatan yang lebih holistik dan berbasis komunitas akan memastikan bahwa RTH tidak hanya memenuhi standar ekologis, tetapi juga menjadi ruang yang nyaman dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dan advokasi WALHI DIY memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan masyarakat terhadap pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kelurahan Kricak, Kota Yogyakarta. Partisipasi masyarakat yang aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan RTH meningkatkan rasa kepemilikan dan kepuasan terhadap hasil pembangunan. Masyarakat yang terlibat merasa bahwa RTH yang dibangun lebih sesuai dengan kebutuhan mereka, baik dari segi fungsionalitas, kualitas ruang, maupun kenyamanan yang ditawarkan. Selain itu, advokasi WALHI DIY juga memberikan dampak positif terhadap kepuasan masyarakat, karena lembaga ini berperan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya RTH, serta memastikan bahwa kebijakan pembangunan yang diambil oleh pemerintah memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. WALHI DIY berhasil memfasilitasi komunikasi antara masyarakat dan pemerintah, sehingga pembangunan RTH menjadi lebih inklusif dan ramah lingkungan. Kombinasi antara partisipasi masyarakat dan advokasi ini menghasilkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi karena masyarakat merasa dihargai dan dilibatkan dalam setiap tahap pembangunan. Keberhasilan pembangunan RTH di Kelurahan Kricak menunjukkan pentingnya melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap proyek pembangunan yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan mereka.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan, seperti kurangnya koordinasi antara pihak-pihak terkait dan masalah teknis yang belum sepenuhnya teratasi, seperti pengelolaan air dan pemilihan tanaman yang sesuai. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dan advokasi perlu diperkuat agar dampak positif dari pembangunan RTH dapat dirasakan secara lebih merata.

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, berikut adalah beberapa saran yang dapat disarankan untuk meningkatkan kualitas pembangunan RTH di masa depan. Pertama, pemerintah Kota Yogyakarta sebaiknya terus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahap pembangunan RTH. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan forum-forum diskusi, pertemuan rutin, dan pelatihan yang melibatkan masyarakat secara langsung. Masyarakat yang terlibat dalam perencanaan dan pengelolaan RTH lebih cenderung merasa memiliki dan menjaga ruang tersebut, sehingga kualitas RTH akan lebih terjaga. Kedua, pemberdayaan lembaga swadaya masyarakat seperti WALHI DIY sangat penting dalam memastikan bahwa pembangunan RTH tidak hanya mengutamakan aspek teknis, tetapi juga memperhatikan kebutuhan sosial dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, pemberdayaan LSM harus terus didorong dengan memberikan ruang yang lebih besar untuk mereka dalam proses pembuatan kebijakan publik terkait dengan pembangunan RTH.

Ketiga, terdapat kebutuhan untuk meningkatkan koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga terkait lainnya, termasuk pihak swasta. Pembagian peran yang jelas dan kolaborasi yang baik antara berbagai pihak akan mempercepat pencapaian target RTH dan memastikan bahwa hasil yang dicapai benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Keempat, dalam pembangunan RTH, sangat penting untuk memperhatikan aspek teknis seperti pemilihan tanaman yang sesuai dengan kondisi lingkungan setempat, pengelolaan air yang efektif, serta penyediaan fasilitas yang memadai. Pemerintah daerah perlu bekerja sama dengan ahli lingkungan dan masyarakat untuk memastikan bahwa RTH yang dibangun memenuhi standar ekologis dan sosial yang dibutuhkan. Terakhir, setelah pembangunan RTH selesai, sangat penting untuk melakukan evaluasi berkala dan pemeliharaan yang melibatkan masyarakat. Hal ini akan memastikan bahwa RTH tetap berfungsi dengan baik dalam jangka panjang, serta dapat terus menjadi ruang yang bermanfaat untuk rekreasi, sosial, dan lingkungan.

## REFERENSI

- Azizah, S. (2019). *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Perkotaan*. Jurnal Perencanaan Kota, 14(3), 45-60.
- Fitriani, L., & Rahman, F. (2020). *Peran WALHI DIY dalam Advokasi Pembangunan RTH di*

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**

[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

209

Indexed



SINTA 5



# GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 12 Nomor 1 September 2025

Yogyakarta. *Jurnal Advokasi Lingkungan*, 5(1), 22-34.

Ghozali, A., & Edinita, D. (2021). "Arahan Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau Publik Berdasarkan Persepsi Masyarakat di Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda." *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 17(4), 444–456.

Miller, S., & Jane, D. (2005). *Advocacy and Public Policy: A Guide for Social Change*. New York: Routledge.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008. *Pedoman Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Perkotaan*.

Purnomohadi, E. (2006). *Pentingnya Ruang Terbuka Hijau untuk Keberlanjutan Perkotaan*. Yogyakarta: Penerbit UGM.

Setiowati, R., Mizuno, K., Hasibuan, H. S., & Koestoer, R. H. (2023). "Urban Green Spaces for Support Healthiness in Jakarta During the COVID-19 Pandemic: A Quantitative Study." *Environmental Engineering Research*, 28(2), 0–2.

Sitorus, N., & Wulandari, D. (2022). *Pentingnya Ruang Terbuka Hijau untuk Kualitas Hidup Perkotaan*. *Jurnal Sumber Daya Alam*, 10(1), 59-72.

Suharto, M. (2006). *Advokasi Lingkungan: Menyuarakan Kebutuhan Masyarakat*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Tjiptono, F. (2005). *Pemasaran Jasa: Prinsip, Penerapan, dan Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset.

Westbrook, R. A., & Reilly, M. D. (1983). *Value-Percept Disparity: An Alternative to the Disconfirmation of Expectations Theory of Consumer Satisfaction*. *Advances in Consumer Research*, 10, 256–261.

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**

[redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id](mailto:redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id)

210

